

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA KEDIRI

Febiana<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[akuntansi@unp.ac.id](mailto:akuntansi@unp.ac.id) and [febiana220297@gmail.com](mailto:febiana220297@gmail.com)

Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[akuntansi@unp.ac.id](mailto:akuntansi@unp.ac.id) and [hestin.sw@gmail.com](mailto:hestin.sw@gmail.com)

Andy Kurniawan, M.Ak<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[akuntansi@unp.ac.id](mailto:akuntansi@unp.ac.id) and [andeande666@gmail.com](mailto:andeande666@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to determine the effect of taxpayer awareness, public service accountability, modernization of the administrative system, partial and simultaneous taxation sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses a quantitative approach with a causal associative method. The number of sampling using the Slovin formula obtained a sample size of 100 motorized vehicle taxpayers in the City of Kediri and analyzed using multiple linear regression with SPSS for windows version 23 software. The conclusion of the results of this study are (1) partially taxpayer awareness affects taxpayer compliance. motor vehicle. (2) partially public service accountability affects motor vehicle taxpayer compliance. (3) partially the modernization of the administrative system has an effect on motor vehicle taxpayer compliance. (4) partially the tax sanctions affect the compliance of motor vehicle taxpayers. (5) Simultaneously the awareness of taxpayers, accountability of public services, modernization of administrative systems and tax sanctions have an effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Jumlah pengambilan sampel menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) secara parsial akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) secara parsial modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (4) secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (5) secara simultan kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

**Keywords:** *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah teruma pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia cukuplah besar, bahkan hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor masing-masing. Berdasarkan data yang dilansir dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), di Indonesia terdapat 120.101.047 unit kendaraan bermotor yang terdaftar sampai dengan 2018 (bps.go.id).

Namun dari sekian banyaknya pemilik kendaraan bermotor, terdapat beberapa pihak yang enggan untuk membayar pajak dengan berbagai alasan dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan terutama masyarakat menengah kebawah yang tidak mengerti mengenai bagaimana tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan pajak, fungsi dari dana pajak, penyaluran pajak, serta sanksi pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2015-2019.

Tabel 1  
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Tahun  
2015-2019

Tahun	Jumlah Kendaraan	Pajak yang seharusnya diterima	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
		(dalam Rp)	(dalam Rp)	
2015	2.189	1,235,465,452,180	505,676,647,078	41,9
2016	2.380	1,496,950,364,456	560,611,078,364	42
2017	2.596	1,813,341,218,696	635,807,566,395	35,3
2018	3.487	2,202,392,550,315	750,941,284,900	34,6
2019	3.807	2,517,443,041,010	860,361,045,850	34,6

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Kediri, 2019

Tabel 1 dilihat dari tabel di atas jumlah kendaraan dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 3.487 pajak yang seharusnya diterima sebesar Rp. 2.202.392.550.315 sedangkan jumlah realisasi penerimaannya Rp. 750.941.284.900 dengan persentase 34,6% dan jumlah kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2019 sebesar 3.807 pajak yang seharusnya diterima Rp. 2.517.443.041.010 realisasi penerimaan sebesar Rp. 860.361.045.850 dengan persentase 34,6%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015-2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan.

Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dengan menambah tempat untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor, seperti membuka loket-loket pembayaran di depan kantor kecamatan dan dengan adanya sistem pelayanan online dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.

Hal tersebut di atas juga dibuktikan oleh hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Mahaputri & Noviri, 2016) melakukan penelitian yang berjudul "pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak." Hasil penelitian tersebut adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Denpasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Wardani, 2017) "pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." Hasil penelitian tersebut sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan mengambil judul "**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA KEDIRI**".

## TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

### Pajak

Definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2018, p. 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak diatas dapat diketahui bahwa pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

### Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak (yang harus dibayar) atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2017, p. 22) Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam dalam pembayaran tunggakan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan sokongan bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela.

### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017, p. 46) menyatakan kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang memberikan sebuah pemberian kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Disamping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jadi jika kesadaran wajib pajak meningkat, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Gronroos dalam (Ratminto, 2015, p. 2) yaitu Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak terlihat yang terjadi akibat adanya hubungan antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen/pelanggan.

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik 3 konsep dasar tentang pelayanan publik yaitu (a) pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatur negara serta swasta (atas nama pemerintah), (b) masyarakat merupakan objek dari pelayanan publik, dan (c) bentuk layanan tersebut berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### Modernisasi Sistem Administrasi

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang terbuka dan bertanggung jawab, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terbaru. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mendukung kemajuan teknologi terbaru seperti melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system*. Pengembangan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.

### Sanksi Perpajakan

Menurut (Resmi, 2016, p. 76) Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat kesalahan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi kesalahan maka wajib pajak dihukum dengan petunjuk kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pajak adalah suatu alat pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Dikarena data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berbentuk angka yang dapat diukur secara rasional dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Data berupa data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berasal dari responden yang termasuk dalam sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang membayar Pajak di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kediri sebanyak 14.970 wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel penelitian ini diambil dengan metode *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (\alpha^2)}$$

$$n = \frac{14.970}{1+14.970(0,1^2)}$$

$$n = \frac{14.970}{150,70}$$

n = 99,332 disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer *SPSS version 23 for Windows* yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Akuntabilitas Pelayanan Publik

$X_3$  = Modernisasi Sistem Administrasi

$X_4$  = Sanksi Perpajakan

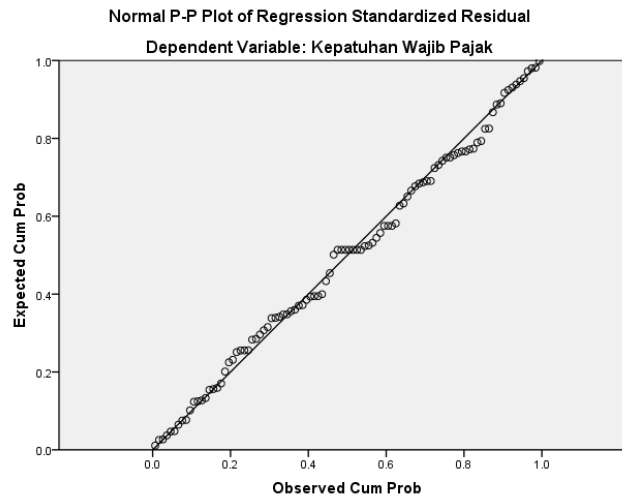
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

$\epsilon$  = Variabel residual atau *error*

## HASIL PENELITIAN

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas terhadap data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan analisa grafik dan statistik. Berikut hasil uji *probability plot* adalah seperti yang ditampilkan pada gambar 1 :



Gambar 1 Uji Normalitas Data (P-P Plot)  
Sumber : data primer diolah peneliti, 2020

Pada gambar tersebut terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41415713
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.520
Asymp. Sig. (2-tailed)		.950

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer diolah peneliti, 2020

Sesuai kriteria pengujian bahwa hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan SPSS, data dinyatakan normal apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 5%, sebaliknya, jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 5% maka data dinyatakan tidak normal. Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,950 > 5%, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Besarnya tingkat multikolinieritas yang masih dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance*  $\geq$  0.10, dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $\leq$  10. Berikut ini disajikan tabel hasil uji multikolinieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.731	1.367
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.739	1.353
Modernisasi Sistem Administrasi	.625	1.601
Sanksi Perpajakan	.574	1.743

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10 dengan  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji korelasi diantara variabel independen dapat dilihat bahwa korelasi antara variabel tersebut relatif tidak tinggi. Hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

## Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji *Durbin Watson*. Untuk uji *Durbin Watson* memiliki ketentuan sebagai berikut:

$d < d_L$  : terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan

$d_L < d < d_U$  : ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik

$d_U < d < 4 - d_U$  : tidak ada masalah autokorelasi

$4 - d_U < d < 4 - d_L$  : masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik

$4 - d_L < d$  : masalah autokorelasi serius

Berdasarkan jumlah  $n = 100$ , maka nilai  $d_L$  adalah 1,592 dan  $d_U$  adalah 1,758. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan nilai uji *Durbin Watson*.

Table 4 Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 <sup>a</sup>	.490	.469	1.444	1.940

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020

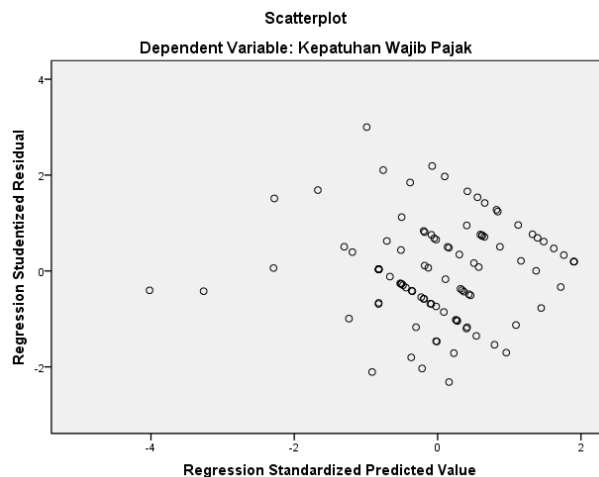
Dari tabel *Durbin-Watson*, dapat dilihat nilainya sebesar 1.998. Hal ini menunjukkan bahwa nilai (*Durbin Watson*) berada diantara nilai  $d_U$  dan  $4 - d_U$  ( $1,759 < 1,940 < 2,241$ ) artinya tidak ada masalah autokorelasi yang terjadi antara variabel independent terhadap variabel dependent.

## Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas,
- 2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Berikut ini dilampirkan grafik *scatterplot* untuk menganalisis apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak dengan cara mengamati nenveharan titik-titik



Gambar 2 Grafik scatterplot

Sumber: data primer diolah peneliti, 2020

Dari *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dengan tidak adanya pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model ini layak dipakai.

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.623	1.327		.469	.640
Kesadaran Wajib Pajak	.217	.085	.219	2.560	.012
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.222	.068	.278	3.262	.002
Modernisasi Sistem Administrasi	.195	.099	.183	1.972	.023
Sanksi Perpajakan	.255	.100	.245	2.536	.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,623 + 0,217X_1 + 0,222X_2 + 0,195X_3 + 0,255X_4 + \varepsilon$$

### Uji t ( Uji Parsial)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji Statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Statistik t.

Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.623	1.327		.469	.640
Kesadaran Wajib Pajak	.217	.085	.219	2.560	.012
Akuntabilitas Pelayanan Publik	.222	.068	.278	3.262	.002
Modernisasi Sistem Administrasi	.195	.099	.183	1.972	.023
Sanksi Perpajakan	.255	.100	.245	2.536	.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020

Sesuai dasar pengambilan keputusan dengan tingkat signifikan 5%, artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya adalah 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan). Jika nilai probabilitas  $\leq$  taraf signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$ .

Dapat dilihat dari tabel 6 diperoleh nilai sig untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ), sehingga hipotesis pertama diterima. Selanjutnya untuk variabel akuntabilitas pelayanan publik ( $X_2$ ) sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ), sehingga hipotesis yang kedua diterima. Kemudian untuk variabel modernisasi sistem administrasi ( $X_3$ ) sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,023 < 0,05$ ) sehingga hipotesis yang ketiga diterima. Lalu untuk variabel sanksi perpajakan ( $X_4$ ) sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,013 < 0,05$ ) sehingga hipotesis yang keempat diterima.

### Uji F (Uji Simultan)

Setelah model persamaan regresi linear berganda didapat, maka perlu dilakukan pengujian pada model persamaan regresi linear berganda tersebut, apakah model persamaan regresi linear berganda tersebut bisa diterima atau tidak. Pengujian model regresi linear berganda tersebut dapat dilakukan dengan uji kelinearan (uji F).

Kriteria Pengujian

$H_0$  : Model regresi linear berganda telah signifikan (terdapat hubungan yang linear).

$H_1$  : Model regresi linear berganda tidak signifikan (tidak terdapat hubungan yang linear).

Untuk pengujian hipotesis pada tabel ANOVA, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	190.206	4	47.551	22.817	.000 <sup>a</sup>
Residual	197.984	95	2.084		
Total	388.190	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020



Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai Signifikansi sebesar 0,000. Pada tabel ANOVA hasil pengujian dapat dilihat nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$ , hal ini menunjukkan model regresi linear berganda dinyatakan signifikan atau terdapat hubungan yang linear, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang kelima diterima yang berarti terdapat pengaruh simultan kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayan publik dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien korelasi ( $R$ ) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai  $R^2$  memiliki kelemahan yaitu nilai  $R^2$  akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 <sup>a</sup>	.490	.469	1.444

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,490 berarti 49,0% kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayan publik dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya 51,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Kediri sejumlah 100 responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedesitas, serta melakukan pengujian hipotesis yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual, dan uji signifikan simultan.

### 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kesadaran wajib pajak mengenai adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi untuk pembiayaan daerah dan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kesadaran akan pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara mampu mendorong kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,217 dan nilai signifikansi sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0,217. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar 0,217.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), Esa dan Alit (2014) dan Mahaputri dan Noviani (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pelayanan pajak meliputi tata ruang gedung Samsat memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak dan gedung Samsat senantiasa menjaga kebersihan ditambah dengan adanya petugas Samsat yang rapi dalam berpenampilan dan senantiasa menjaga kerahasiaan Wajib Pajak mampu mendorong wajib pajak untuk patuh akan kewajiban membayar pajak. Selain itu, pelaksanaan jam kerja Samsat dilaksanakan tepat waktu sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hipotesis kedua yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh akuntabilitas pelayanan publik ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,222 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan akuntabilitas pelayanan publik secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila akuntabilitas pelayanan publik ditingkatkan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0,222. Sebaliknya, jika akuntabilitas pelayanan publik mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar 0,222. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013), dan Mahaputri dan Noviani (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Adanya e-samsat/samsat keliling/samsat paten memberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan memungkinkan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis dan efisien serta membantu saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Selain itu, modernisasi sistem administrasi secara efektif mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor mampu mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

Hipotesis ketiga yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh modernisasi sistem administrasi ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,195 dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima dan dapat disimpulkan modernisasi sistem administrasi secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila modernisasi sistem administrasi ditingkatkan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan sebesar 0,195. Sebaliknya, jika modernisasi sistem administrasi mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar 0,195. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Djumati (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pengenaan sanksi administrasi yang dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan dan penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mampu mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis keempat yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan ( $X_4$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,255 dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis keempat diterima dan dapat disimpulkan sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila sanksi perpajakan ditingkatkan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan

sebesar 0,255. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar 0,255. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) dan Esa dan Alit (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh kesadaran pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak diukur dimana wajib pajakselalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktu dan tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak atas dasar kemauan dan keinginan diri sendiri.

Hipotesis kelima yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh simultan kesadaran pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kelima diterima dan dapat disimpulkan bahwa simultan kesadaran pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi linier berganda sanksi perpajakan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,255 jika dibandingkan variabel bebas kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan modernisasi dalam penelitian ini dengan persamaan regresi linier berganda yang dirumuskan  $Y = 0,623 + 0,217X_1 + 0,222X_2 + 0,195X_3 + 0,255X_4 + \epsilon$ . Selain itu, jika dilihat dari nilai koefisien determinan kesadaran pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 49,0%. Hal ini menunjukkan masih banyak variabel yang mampu mengaruhi kepatuhan wajib pajak diluar model yang diteliti.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ).
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ).
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,023 < 0,05$ ).
4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,013 < 0,05$ ).
5. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

Berdasarkan simpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : (1) Bagi Kantor Bersama Samsat Kota Kediri melihat pengaruh positif yang signifikan dari kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administratif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka diharapkan Kantor Bersama Samsat Kota Kediri terus mempertahankan atau meningkatkan kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administratif dan sanksi pajak. Dengan memberikan pengetahuan mengenai pembaruan sistem pembayaran secara online kepada masyarakat guna mempermudah masyarakat untuk membayar pajak

kendaraan bermotor. (2) Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya, seperti pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan lain sebagainya. Selain itu, sampel penelitian, sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumiati, wa ode sitti. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Akuntansi*.
- Isawati, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekonomia*.
- Mahaputri, N., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. In *Yogyakarta: Andi*.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Ratminto. (2015). Manajemen Pelayanan. In *Pustaka Pelajar*.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://doi.org/ISSN: 2302-8556>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela*, 75, 31–47.
- Widyawati, & Nurlis. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntan Purwokerto*.